



**Tim Lakukan Penilaian Lapangan**

# Wonorejo Nominator Replikasi Desa Anti Korupsi di Kayong Utara

**SUKADANA, SP** - Desa Wonorejo, Kecamatan Seponti dinilai pantas sebagai percontohan Replikasi Desa Anti Korupsi di Kabupaten Kayong Utara. Tim Penilaian Replikasi Desa Anti Korupsi telah turun ke lapangan melakukan penilaian terhadap salah satu nominator yang akan mewakili Kabupaten Kayong Utara di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (24/10).

Oma Zufithansyah, Inspektur di Inspektorat Kabupaten Kayong Utara mengatakan bahwa Desa Wonorejo memang

pantas masuk nominasi sebagai Desa Percontohan Replikasi Desa Anti Korupsi Tahun 2024.

“Jadi kami (Inspektorat) menilai satu desa yang kami nilai terbaik dari setiap kecamatan, terseleksi Desa Wonorejo. Kita berharap sinergi juga terbentuk dari BPD, supaya Desa Wonorejo bisa mewakili hingga ke tingkat nasional nantinya,” kata Oma memberikan kata sambutan pada kegiatan tersebut.

Harapannya kata Oma Zufithansyah, kegiatan penilaian ini dapat mengangkat citra dan semangat membangun desa, serta

terciptanya sinergi (kerjasama) antara program nasional dan daerah terkait bebas dari korupsi dalam membangun integritas masyarakat anti korupsi.

“Pengelolaan dana yang profesional, transparan dan akuntabel supaya pengelolaan dana desa dapat berdampak pada perekonomian, dan penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat desa,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Wonorejo, Sokep menyampaikan, ada tujuh upaya yang telah dilakukan untuk menjadikan Desa Wonorejo sebagai Desa

Percontohan Replikasi Desa Anti Korupsi.

Pertama, melengkapi dokumentasi administrasi. Kedua, mensosialisasikan kepada aparat pemerintahan desa dan masyarakat Desa Wonorejo terkait Replikasi Desa Anti Korupsi.

Ketiga, aplikasi perangkat desa menggunakan mesin finger print. Keempat, pengelolaan keuangan menggunakan sistem pembayaran melalui CMS (*Cash Management System*).

Kelima, memperbanyak dan memperluas media informasi desa. Keenam, membuat slogan pelayanan “KLIMAKS”

(Kepuasan Layanan Gratis dan Maksimal). Terakhir, membuat layanan pengaduan melalui online di website desa dan media sosial lainnya

Sedangkan Ketua Tim Penilaian Replikasi Desa Anti Korupsi, Iskandar menuturkan bahwa penilaian teknis yang dilakukan pada tahun 2024 berbeda dengan tahun 2023.

Dia menyebutkan bahwa perlu pemaparan dan pemeriksaan secara implementasi yang dijalankan dokumentasi, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa.

“Jadi penjelasan teknis

tahapan-tahapan penilaian agak berbeda di tahun 2023. Kalau dulu hanya melihat kelengkapan dokumen saja. Tapi tahun 2024 ini, KPK mengharapkan tidak hanya pemenuhan dividen, tapi juga melihat implementasi (penerapan),” ungkapnya.

Iskandar menjelaskan, pola penilaian ada dokumennya, *hard copy* juga disampaikan. Apalagi juga ada peninjauan ke Kantor Desa Wonorejo terkait tata kelola pemerintahan desa, jenis-jenis pelayanan apa saja yang ada di Desa Wonorejo, apakah gratis atau ada semacam retribusi.

“Tentu semua itu akan kita langsung cross check kepada tokoh masyarakat disini (Desa Wonorejo),” tutur Iskandar.

Turut hadir dalam kegiatan Penilaian Replikasi Desa Percontohan Desa Anti Korupsi di Desa Wonorejo diantaranya Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Bidang Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat, Diskominfo Kalimantan Barat, Inspektorat Kabupaten Kayong Utara, Dinas SP3APMD Kayong Utara, Diskominfo Kayong Utara, Kepala BPD Desa Wonorejo. (rls/rif)